

Penerapan Sistem Akuntansi atas Realisasi Biaya Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Reka Septiani^{1*}, Yessi Rinanda²

^{1,2} Akademi Akuntansi Indonesia Padang, Padang, Sumatera Barat, Indonesia

*Corresponding author: rekaseptiani1998@gmail.com

Info Artikel

Direvisi, 18-03-2025

Diterima, 28-03-2025

Dipublikasi, 31-03-2025

Kata Kunci:

Penerapan Sistem,
Realisasi Biaya

Keywords:

System Implementation,
Cost Realization

Abstrak

Penelitian ini dilaksanakan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, yang akan membahas tentang realisasi biaya perjalanan dinas. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Dari penelitian ini akan didapatkan informasi apakah biaya perjalanan dinas telah sesuai dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat, bagaimana penerapan sistem biaya perjalanan dinas yang sudah dilakukan. Dari penelitian ini didapatkan hasil bahwa realisasi biaya sudah dilaksanakan sesuai aturan yang ada dengan kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan.

Abstract

This final project is carried out in the Regional People's Representative Council Of West Sumatra Province, which will discuss the realization of official travel costs. The research method used is qualitative method. From this study, information will be obtained whether official travel costs are in accordance with the activities carried out by the West Sumatra Regional People's Representative Council, how the implementation of the official travel fee system is carried out. From this study, it was found that the realization of costs had been carried out according to existing rules with official travel activities carried out.

PENDAHULUAN

Sekretariat Dewan merupakan perangkat daerah yang melayani, menyediakan, dan mengkoordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh anggota dewan, melalui pendamping perwakilan dari berbagai unit kerja untuk setiap anggota dewan yang melaksanakan perjalanan dinas. Perjalanan dinas merupakan bagian dari program dan kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) Anggota Dewan yang didampingi oleh pegawai Sekretariat Dewan yang termasuk ke dalam rencana kerja dan anggaran (RKA) dan juga termasuk ke dalam belanja daerah yang harus direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan, ditatausahakan, dan dipertanggungjawabkan dengan bukti hasil laporan perjalanan dinas.

Belanja Perjalanan dinas ini dikategorikan menjadi dua, yakni Perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar daerah, dalam pembuatan SPPD penulis masih menemukan adanya kekurangan seperti keterlambatan dalam pembayaran biaya perjalanan dinas, kesalahan dalam pembuatan SPPD, kesalahan- kesalahan pengetikan dalam pengimputan data sehingga pembuatan SPPD dilakukan berulang- ulang, hal ini mengakibatkan banyaknya kertas yang terbuang, selain itu waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama.

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah di provinsi/ kabupaten/ kota di Indonesia disebutkan dalam UUD 1945 pasal 18 ayat 3: "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan

kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum”. DPRD memiliki fungsi legislasi yaitu berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, dan fungsi anggaran yaitu kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD) serta fungsi pengawasan yaitu kewenangan mengontrol pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan lainnya serta kebijakan pemerintah daerah. Sesuai dengan definisi DPRD yang diterangkan diatas, DPRD memiliki fungsi yang kompleks dan memiliki peran penting dalam membuat kebijakan tertentu, pertanggung jawaban kepatutan rancangan undang-undang, termasuk persetujuan anggaran untuk menyerap pendapatan yang maksimal dan keefektifan pengeluaran/belanja.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat adalah salah satu lembaga legislatif yang membantu keberlangsungan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat. DPRD Provinsi Sumatera Barat akan berkoordinasi dengan daerah tingkat kabupaten/kota yang ada di Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas dan fungsi DPRD tersebut. Dengan adanya koordinasi itu menyebabkan pegawai dan wakil rakyat yang bekerja di DPRD Sumatera Barat akan melakukan beberapa perjalanan dinas baik itu di dalam daerah (dalam Provinsi Sumatera Barat) ataupun di luar daerah (di luar Provinsi Sumatera Barat). Berdasarkan kegiatan perjalanan dinas yang dilakukan pemerintah khususnya DPRD tersebut memerlukan proses penganggaran dana yang tepat dan sesuai dengan peraturan. Dalam proses penganggaran tersebut terdapat proses awal yang penting sebagai dasar pengenaan biaya perjalanan dinas oleh DPRD Sumbar yaitu proses penyusunan anggaran.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik membahas lebih lanjut dengan mengangkat judul “Penerapan Sistem Atas Realisasi Biaya Perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang disajikan di atas, maka yang menjadi masalah pokok laporan ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah Sistem Akuntansi Perjalanan dinas pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?
2. Apakah Realisasi Biaya perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat sudah sesuai dengan peraturan yang ada ?

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Sistem

Sistem merupakan suatu kumpulan komponen dan elemen yang saling terintegrasi, komponen yang terorganisir dan bekerja sama dalam mewujudkan suatu tujuan tertentu. Menurut Sutanto Djahir dan Pratita (2015:6) mengemukakan bahwa “sistem adalah kumpulan atau grup dari subsistem/ bagian/ komponen apapun, baik fisik ataupun nonfisik yang saling berhubungan satu sama yang lain dan bekerja sama secara harmonis untuk mencapai suatu tujuan tertentu”

Pengertian Perjalanan Dinas

Perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh pegawai suatu perusahaan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan. Tugas pekerjaan kedinasan merupakan tugas yang diberikan dengan kepentingan lembaga atau perusahaan yang bersangkutan. Perjalanan dinas dilakukan karna berbagai kepentingan, antara lain pelaksanaan pengawasan di kantor cabang atau perusahaan cabang, seminar, diklat, tender, janji temu, peninjauan kerjasama, menghadiri acara seremonial, kegiatan sosial dan lain-lain (Kembuan, 2019).

Sistem Akuntansi perjalanan Dinas

Menurut Mulyadi (2016:3) sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang

dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan sedangkan sistem akuntansi menurut Mulyadi (2016) adalah untuk menyediakan informasi pengelola kegiatan usaha baru, untuk mengurangi biaya klerikal dalam penyelenggaraan catatan akuntansi.

Fungsi yang Terkait Biaya Perjalanan Dinas

Menurut R QOTRUNNADA (2016:31) Fungsi-fungsi yang terkait atas biaya perjalanan dinas pada Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) diantaranya:

- a. Pemberi Perintah Perjalanan Dinas Bertugas untuk memberi perintah perjalanan dinas serta memberikan otorisasi dengan menandatangani formulir permohonan SPPD dan formulir perhitungan SPPD.
- b. Fungsi Admin SPPD
Bertugas untuk membuat formulir permohonan SPPD dan formulir perhitungan SPPD, kemudian menyerahkannya ke Direktorat Keuangan fungsi verifikasi dan pembayaran.
- c. Fungsi Verifikasi dan Pembayaran
Bertugas untuk memverifikasi jumlah biaya SPPD yang tercantum pada formulir perhitungan SPPD apakah sudah sesuai dengan jumlah hari perjalanan dinas yang akan dilaksanakan, serta membuat formulir Verifikasi dan persetujuan untuk diprosesnya pencairan biaya perjalanan dinas tersebut.
- d. Fungsi Asisten Manajer Keuangan
Bertugas untuk memverifikasi dan menyetujui dengan menandatangani pada formulir verifikasi dan persetujuan tersebut.
- e. Fungsi Manajer Keuangan
Bertugas memberi persetujuan untuk dilakukannya pengeluaran kas untuk biaya perjalanan dinas dengan menandatangani pada formulir verifikasi dan persetujuan
- f. Fungsi Direktur Keuangan
Bertugas memberi otorisasi ketika adanya pengeluaran kas yang menggunakan kas dibank.
- g. Fungsi Kasir
Bertugas untuk melakukan pengeluaran kas sejumlah yang tertera pada formulir verifikasi dan persetujuan yang sudah ditandatangani oleh Asisten Manajer Keuangan dan Manajer Keuangan mencatat jurnal pengeluaran kas.

Dokumen yang Terkait Perjalanan Dinas

1. Dokumen Khusus
Dokumen khusus adalah dokumen yang berhubungan langsung dengan tujuan perjalanan dinas.
2. Dokumen Pendukung
Dokumen yang dapat disebut dokumen perjalanan. dokumen pendukung atau dokumen perjalanan karena fungsi dokumen ini adalah sebagai pendukung pelaksanaan dan pencapaian tujuan perjalanan dinas.
Contoh dokumen-dokumen tersebut misalnya:
 - a. Surat Tugas
 - b. Passport (tanda bukti kewarganegaraan atau tanda bukti diri di negara lain)
 - c. Visa (Surat ijin seseorang masuk ke negara lain)
 - d. Fiskal Menurut Wursanto dalam Gaol (2017:339) dokumen perjalanan dinas yang harus dipersiapkan sebelum melakukan perjalanan dinas adalah:
 1. Surat Tugas
Surat yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan suatu tugas kedinasan.
 2. Surat Perintah Perjalanan Dinas
Surat perintah dari pejabat yang berwenang untuk mengadakan perjalanan dinas.

Prosedur Biaya Perjalanan Dinas

Adapun Prosedur Biaya Perjalanan Dinas yaitu:

1. Kepala dinas menerima surat pemberitahuan atau undangan.
2. Kepala dinas memberikan perintah kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas perjalanan dinas melalui surat atau pun lisan.
3. Pegawai mengajukan Nota Permintaan Perjalanan Dinas (NPPD) kepada kepala sub bagian dan kepegawaian yang disetujui.
4. Setelah disetujui, kepala sub bagian umum dan kepegawaian membuat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dan menyerahkan kepada pegawai.
5. Pegawai menyerahkan SPT dan SPPD kepada Kepala Dinas untuk ditanda tangan dan cap.
6. Pegawai melakukan perjalanan Dinas dan menyerahkan dokumen SPPD untuk di tandatangani oleh dinas atau instansi setempat
7. Setelah melakukan perjalanan dinas, pegawai membuat laporan hasil perjalanan dinas dan menyerahkan kepada kepala dinas.
8. Setelah itu pegawai menyerahkan SPT dan SPPD serta bukti pembayaran selama melakukan perjalanan dinas kepala bagian perencanaan dan keuangan sebagai bukti pendukung untuk pencairan.
9. Bagian perencanaan dan keuangan melakukan verifikasi perhitungan biaya perjalanan dinas dan membuat kwitansi.
10. Setelah verifikasi dan membuat kwitansi, bagian perencanaan dan keuangan melakukan pencairan dana dengan cara mentrasfer ke rekening anggota yang bersangkutan.

Catatan Pengeluaran Kas Biaya Perjalanan Dinas

Menurut Mulyadi (2016: 67) catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem akuntansi pengeluaran kas dengan cek adalah:

- a. Jurnal pengeluaran kas
Jurnal pengeluaran kas digunakan untuk mencatat transaksi pembelian digunakan jurnal pembelian dan mencatat pengeluaran kas digunakan jurnal pengeluaran kas.
- b. Register Cek (*Check Register*)
Register cek digunakan untuk mencatat transaksi pembelian digunakan dengan dua jurnal yaitu bukti kas keluar dan register cek.

Sistem pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (2016:518) unsur- unsur pengendalian internal yaitu:

1. Struktur Organisasi

Fungsi penyimpanan kas harus terpisah dari fungsi akuntansi. Unsur sistem pengendalian internal mengharuskan pemisahan fungsi akuntansi yang tercatat dalam catatan akuntansi dari fungsi penyimpanan, agar data akuntansi yang tercatat dalam catatan akuntansi dijamin keadaannya. Sistem kas didalam nya ada fungsi penyimpanan kas yang di pegang oleh bagian kasir dan harus di pisahkan dengan bagian akuntansi kas yang diprgang oleh bagian jurnal. Dengan pemisahan ini, catatan akuntansi yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi dapat berfungsi sebagai pengawas semua mutasi kas yang disimpan oleh fungsi penyimpanan kas.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

a. Studi Lapangan

Menurut Danang Sunyoto (2017:22) studi lapangan adalah suatu metode yang digunakan oleh peneliti dengan cara pengamatan langsung terhadap kegiatan yang dilakukan Perusahaan. Penulis melakukan penelitian ini di Kantor Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera barat untuk mengetahui tentang Penerapan Sistem Akuntansi atas Realisasi Biaya Perjalanan Dinas.

b. Studi Perpustakaan

Menurut Djaman dan Aan Komariah (2017:105), studi kepustakaan merupakan pendukung penelitian yang berasal dari pandanganpandangan ahli dalam bentuk yang tertulis berupa referensi, buku, jurnal, laporan penelitian dan laporan karya ilmiah lainnya. Penulis melakukan studi kepustakaan dengan cara membaca literatur serta sumber- sumber lainnya yang berkaitan dengan Penerapan Sistem Akuntansi atas Realisasi perjalanan Dinas Dewan perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Provinsi Sumatera barat.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan Penulis dalam laporan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :

a. Observasi

Menurut Morrisan (2017:143) observasi adalah suatu pegamatan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan pancaindra sebagai alat bantu utamanya. Dalam hal ini pancaindra digunakan untuk gejala yang diamati dan apa yang di tangkap tadi dicatat selanjutnya catatan tadi di analisis. Penulis melakukan Observasi dengan cara mengamati langsung bagaimana Penerapan Sistem Akuntansi atas Realisasi Biaya Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.

b. Wawancara

Menurut Sujarweni (2019:31) mengatakan bahwa wawancara adalah proses memperoleh penjelasan untuk mengumpulkan informasi dengan menggunakan cara tanya jawab bisa sambil bertatap muka ataupun tanpa tatap muka yaitu melalui media telekomunikasi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman. Pada hakikat nya wawancara merupakan kegiatan untuk memperoleh informasi secara mendalam tentang sebuah isu atau tema yang diangkat dalam penelitian.

c. Dokumentasi

Menurut Sugiyono dan Susilo (2018:45) dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. dan dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental dari seseorang, studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. Penuulis melakukan teknik pengumpulan data dengan cara memperoleh dokumentasi berupa Surat Tugas (ST), Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD).

Jenis Dan Sumber Data

a. Jenis Data

Menurut sugiyono (2017:111) jenis data ada 2 yaitu, data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat atau gambar. Sedangkan data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka, penulis menggunakan data kualitatif yang berbentuk informasi seperti gambaran untuk membahas rumusan masalah.

b. Sumber Data

Menurut Arikunto (2013:172) sumber data adalah subyek dimana data diperoleh, sumber data yang tidak tepat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh dari sumbernya, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak- pihak terkait dengan masalah yang akan diteliti (informan). Sumber data primer dalam penelitian ini adalah informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pegawai sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Data Sekunder adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, yang mana diperoleh untuk melihat gambaran umum tentang Penerapan Sistem Akuntansi Atas Realisasi Biaya Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, data sekunder ini memperoleh data dari website, buku, literatur dan lain-lain.

Metode Analisis

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:9) metode deskriptif kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci teknik pengumpulan data dilakukan secara trigulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Penelitian deskriptif kualitatif adalah mendeskripsikan atau menggambarkan secara sistematis fakta- fakta, sifatsifat hubungan antar fenomena yang diteliti. Sehubungan dengan masalah penelitian ini penulis rencana kerja atau pedoman pelaksanaan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dimana yang di kumpulkan nya berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep- konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau dalam bidang tertentu dalam kehidupan objeknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi yang Terkait Biaya Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat

Fungsi yang terkait dalam Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat adalah:

- a. Fungsi Staf atau pembuat surat tugas
- b. Fungsi kabag Persidangan atau pertanggungjawaban
- c. Fungsi kabag Anggaran atau pertanggungjawaban
- d. Fungsi Sekwan
- e. Fungsi Keuangan atau Bendahara keuangan

Dokumen Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Dearah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.

- a. Nota Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.
- b. Surat Perintah Tugas Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat.
- c. Surat Perjalanan Dinas

- d. Daftar Pembayaran Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat
- e. Kuitansi
- f. Laporan Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.
- g. Dokumentasi Kegiatan Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat.

Catatan Akuntansi

Jurnal Pengeluaran kas untuk biaya perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat menggunakan sistem kas, dan untuk pembayarannya dapat melalui transfer ke rekening masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan salah satu contoh Perjalanan Dinas yang dilaksanakan oleh Bapak Drs. H Asra Faber, MM ke DPRD Provinsi Sumatera Utara sebesar RP. 10.940.000.

Biaya Perjalanan Dinas	10.940.000	
Kas		10.940.000

Prosedur Biaya Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Adapun Prosedur perjalanan Dinas yaitu:

- a. Pihak atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang melakukan Perjalanan Dinas harus membawa dokumen yaitu, Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Perjalanan Dinas yang telah dibuat staf atau pegawai sebelumnya.
- b. Setelah melakukan perjalanan dinas anggota dewan perwakilan provinsi Sumatera Barat akan menyerahkan dokumen yang dibawa waktu melakukan perjalanan dinas seperti surat perintah tugas dan surat perintah perjalanan dinas kepada pegawai atau staf yang telah ditugaskan di komisi yang telah ditentukan.
- c. Dan staf atau pegawai akan membuat laporan perjalanan dinas anggota dewan provinsi Sumatera Barat berupa dokumen yaitu nota perjalanan dinas, surat perintah tugas, surat perintah perjalanan dinas, kwitansi, Daftar Pembayaran, laporan perjalanan dinas, dan dokumentasi perjalanan dinas, dan setelah membuat dokumen tersebut maka anggota dewan provinsi Sumatera Barat akan menandatangani di daftar pembayaran sebelum diserahkan ke bagian anggaran dan bagian anggaran akan memparaf dokumen tersebut kalau dokumen tersebut sudah benar
- d. Dan sesudah di bagian anggaran dokumen tersebut akan diserahkan ke ruangan sekwan untuk mendapatkan tandatangan dari sekwan tersebut
- e. Setelah dokumen tersebut mendapatkan tandatangan dari sekwan maka dokumen tersebut akan diserahkan ke bagian keuangan, dan di bagian keuangan akan diperiksa semua kelengkapan dokumen yang telah ditentukan dan setelah dokumen tersebut sudah benar dan angka yang ditulis sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan maka dokumen tersebut akan diserahkan ke bagian bendahara keuangan dan bendahara keuangan akan mentransfer uang tersebut ke rekening anggota dewan provinsi Sumatera Barat itu sendiri.

Unsur Pengendalian Internal Pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Adapun unsur Pengendalian Internal pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah.

- a. Organisasi

Pada kantor dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat fungsi staf, fungsi pelaksanaan perjalanan dinas, fungsi pertanggungjawaban dan fungsi bendahara keuangan telah dilakukan secara terpisah.

b. Otorisasi

Semua dokumen yang terkait dalam Penerapan Sistem Akuntansi Atas Realisasi Biaya Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah di otorisasikan oleh Pejabat yang berwenang.

c. Praktik yang Sehat.

Dokumen yang telah bernomor urut tercatat, dan instansi telah melakukan rotasi terhadap beberapa karyawan.

Kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pembayaran perjalanan dinas dalam mentrasfer ke rekening masing- masing Anggota Dewan Provinsi Sumatera Barat

a. Kode bank salah

b. Gangguan Sistem

c. Nomor Rekening tujuan Salah

Kesesuaian Realisasi Biaya Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Dengan adanya data di atas maka anggaran Biaya Perjalanan Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat sudah Terealisasi dan sesuai dengan Peraturan Gubernur no 41 tahun 2020.

KESIMPULAN

1. Berdasarkan hasil penelitian Sistem Akuntansi Perjalanan dinas pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat sudah sesuai dengan peraturan dan perundang- undangan yang berlaku di Dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat.
2. Realisasi Biaya perjalanan dinas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat sudah sesuai dengan peraturan yang ada dan mengenai Penerapan Sistem Akuntansi atas Realisasi Biaya Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Barat dapat di simpulkan sebagai berikut, Terdapat dokumen- dokumen yang diperlukan dalam melakukan perjalanan dinas yaitu Nota Dinas, Surat Perintah Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas, kwitansi. Mengenai Biaya Perjalanan Dinas pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah diatur oleh peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor : 41 Tahun 2020, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2024.

DAFTAR PUSTAKA

- Coulter dan Robbins, (2016) “ *Sruktur Organisasi* ” Jakarta.
- Djahir Sutanto dan Pratita (2015).” *Pengertian sistem* ”. Yogyakarta: Deepublish
- Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Barat (2018). “ *tugas dan tanggung jawab sekretariat Provinsi Sumatera Barat* ”
- Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Barat (2018). *Sejarah Dinas Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Barat 2018*.
- Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provins Sumatera Barat (2018). *Visi dan Misi Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Barat 2018*.
- Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Barat (2018). *Struktur Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Barat 2023*.

- Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Barat (2018). *Tugas dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Provinsi Sumatera Barat 2023*.
- E.O. Lailani, evy.lct (2023). *Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban Terhadap Pengendalian Biaya Perjalanan Dinas Oleh Auditama Keuangan Negara V Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan Ri*
- Evi Anakusuma Lestari, Endang Anjarwani dan Nadiyah Agitha (2018). *Rancang Bangun Sistem Informasi Surat perjalanan Dinas pada sekretariat daerah Berbasis Web*.
- Hermawan Hirman, (2018) “ *tujuan perjalanan dinas* ” soekarno hatta.
- Lestari anakusuma Evi dan Endang Sri, (2018) “ *Rancang bangun sistem Informasi surat perjalanan dinas pada sekretariat daerah berbasi web* ”.
- Mulyadi, (2016) “ *sistem akuntansi perjalanan dinas* ”. Jakarta: salemba empat.
- Mulyadi, (2016) “ *Catatan pengeluaran kas biaya perjalanan dinas* ”. Jakarta: salemba empat.
- Mulyadi, (2016) “ *Unsur Pengendalian Internal pengeluaran kas* ”. Jakarta: salemba empat.
- Qotrunada R (2016) “ *Fungsi yang terkait atas biaya perjalanan dinas* ” tanggerang banten.
- Rinanda, Yessi (2023), *Sistem Akuntansi, Media Sains Indonesia, Bandung*.
- Sedianingsih (2017) “ *pengertian perjalanan dinas* ” jakarta : prenada Media.
- Susan Rachmawati, Tri Retnasari dan Sunarto (2018). *Optimalisasi Sistem Informasi Perjalanan Dinas Dalam Meningkatkan Efisiensi Biaya Perusahaan*.
- Titi Febriyanti (2017). *Pelaksanaan Perjalanan Dinas Pada Pt Kruz Aufa Mandiri Di Jakarta*.
- Talitha Irfanolita dan Robert Pius Pardede 2022. *Penerapan Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas Atas Biaya Perjalanan Dinas Pada PT. Adhi Karya (Persero) Tbk*. Yatimah, (2016) “ *Dokumen yang terkait dalam perjalanan dinas* ” Bandung: CV Pustaka Setia.